

BAB I

PENDAHULUAN

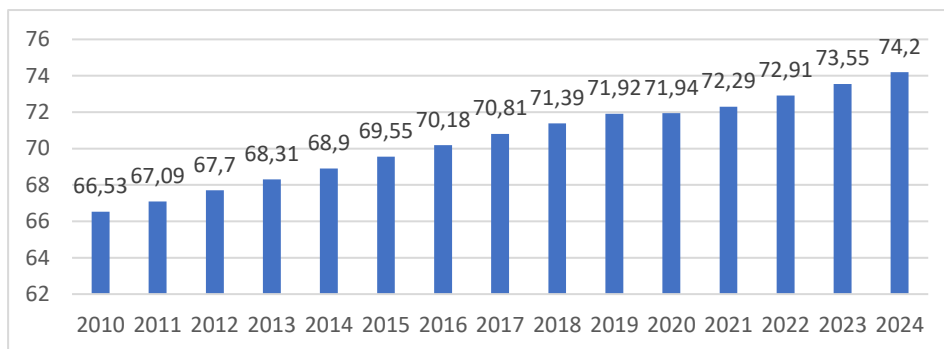
A. Latar Belakang Masalah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebagaimana dirumuskan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1999, merupakan salah satu metode untuk menilai tingkat keberhasilan dalam pembangunan manusia. Sejak diperkenalkan pada tahun 1990, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengevaluasi pencapaian pembangunan manusia suatu negara. Dalam mengukur kemampuan dasar tersebut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggunakan tiga indikator utama yang merefleksikan kualitas hidup manusia, yaitu tingkat kesehatan dan lama hidup, tingkat pendidikan, dan standar hidup.

Dalam konteks pemerintahan daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak hanya mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan kebijakan pembangunan daerah atau salah satu ukuran kinerja hasil (*outcome*) dari pengelolaan keuangan daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal melalui UU No.22 dan 25 tahun 1999 serta diperbarui melalui UU 32 dan 33 Tahun 2004, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan mengelola anggaran secara efektif dan efisien, khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan dan pengembangan infrastruktur.

Secara nasional, Indonesia menghadapi tantangan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pengelolaan anggaran daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia meningkat dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 74,02 pada tahun 2024, tetapi masih di bawah rata-rata *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) sekitar 0,750. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia terus meningkat setiap tahun, namun kesenjangan Indeks pembangunan Manusia (IPM) antar provinsi tetap tinggi. Provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi pada tahun 2024 dipegang oleh DKI Jakarta yaitu 83,08, sementara Papua Pegunungan menduduki posisi provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) terendah yaitu 53,42. Perbedaan ini menunjukkan bahwa peningkatan IPM secara agregat belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kualitas pembangunan manusia diseluruh wilayah.



Gambar 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2010-2024

Sumber : www.bps.go.id, data diolah peneliti (2025)

Kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga tampak jelas di tingkat kabupaten/kota misalnya, di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Indramayu mencatat peningkatan yang berkesinambungan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2010-2024, namun pencapaian tersebut masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024 Indramayu termasuk dalam lima besar kabupaten dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah di Jawa Barat dengan nilai 69,83 yang menggambarkan bahwa meskipun tren peningkatan terus terjadi, pembangunan manusia di Indramayu belum optimal di bandingkan daerah lain (BPS Provinsi Jawa Barat, 2024).

Tabel 1. 1 Perbandingan IPM Ciayumajakuning

Tahun	IPM				
	Kabupaten Indramayu	Kabupaten Cirebon	Kota Cirebon	Kabupaten Majalengka	Kabupaten Kuningan
2010	60,86	63,64	70,74	62,3	64,4
2011	61,47	64,17	71,49	62,67	65,04
2012	62,09	64,48	71,97	63,13	65,6
2013	62,98	65,06	72,27	63,71	66,16
2014	63,55	65,53	72,93	64,07	66,63
2015	64,36	66,07	73,34	64,75	67,19
2016	64,78	66,7	73,7	65,25	67,51
2017	65,58	67,39	74,00	65,92	67,78
2018	66,36	68,05	74,35	66,72	68,55

2019	66,96	68,69	74,92	67,52	69,12
2020	67,29	68,75	74,89	67,59	69,38
2021	67,64	69,12	75,25	67,81	69,71
2022	68,55	70,06	75,89	68,56	70,16
2023	69,25	70,95	76,46	69,13	70,72
2024	69,83	71,44	77,08	69,74	71,26

Sumber : [Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu](#), data diolah peneliti (2025)

Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan manusia melalui penyediaan layanan dasar memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyatnya dengan memberikan layanan dasar seperti pendidikan dan Kesehatan (Sumiyarti & Lazuardy Pratama, 2024). Belanja pendidikan dalam konteks pemerintahan daerah adalah dana yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung berbagai aktivitas pendidikan pembangunan dan pemeliharaan sekolah, penyediaan sarana dan prasarana, beasiswa, pelatihan guru, dan operasional pendidikan (Prastiwi & Handayani, 2024).

Di Kabupaten Indramayu, capaian indikator pendidikan masih menunjukkan kondisi yang relatif tertinggal dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2024, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tercatat sekitar 6,8 tahun, selain itu, proporsi penduduk yang tidak memiliki ijazah Sekolah Dasar (SD) masih cukup tinggi, yaitu sebesar 22,25%. BPS Kabupaten Indramayu menyebutkan bahwa masalah tersebut berakar pada fasilitas Pendidikan yang belum memadai serta faktor ekonomi masyarakat. Adanya faktor ini menciptakan kondisi dimana meskipun biaya pendidikan disubsidi, masyarakat tetap kesulitan mengaksesnya karena beban kebutuhan hidup mendesak (BPS Kabupaten Indramayu, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian pendidikan di Kabupaten Indramayu masih menghadapi tantangan struktural, sehingga efektivitas belanja pendidikan dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu dikaji lebih lanjut.

Penelitian Paulus Ratuludji et al., (2023) menunjukkan bahwa belanja pendidikan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Peningkatan alokasi anggaran pendidikan dinilai mampu memperluas akses

sekolah, meningkatkan kualitas sarana pendidikan, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hasil ini sejalan dengan temuan (Fajar & Indrawati, 2020) serta (Nursita et al., 2025) yang menegaskan bahwa pendidikan berperan penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas penduduk.

Namun, hasil berbeda ditemukan oleh (Aulia et al., 2023) dan (Ismail et al., 2021) yang menyatakan bahwa belanja pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kondisi ini terjadi karena pengaruh pendidikan terhadap pembangunan manusia cenderung bersifat jangka panjang sehingga hasilnya tidak langsung terlihat dalam periode penelitian. Perbedaan hasil ini mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan, sehingga perlu diteliti lebih lanjut efektivitas belanja pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Indramayu.

Selain pendidikan, kesehatan juga merupakan dimensi penting yang menentukan tinggi rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu daerah, karena kesehatan berhubungan langsung dengan kemampuan individu untuk hidup produktif dan sejahtera. Belanja kesehatan mencakup pengeluaran pemerintah untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas kesehatan agar masyarakat dapat mengakses layanan secara merata (Aulia et al., 2023). Salah satu indikator yang mencerminkan keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Usia Harapan Hidup (UHH) yang menunjukkan tingkat kesejahteraan dan harapan hidup masyarakat (BPS Kabupaten Indramayu, 2024). Namun Kabupaten Indramayu menghadapi ketimpangan serius dalam akses layanan kesehatan. Saat ini terdapat 11 rumah sakit dengan total 1.046 tempat tidur, namun jumlah tersebut masih jauh dari rasio ideal 1:1.000 penduduk, sehingga menimbulkan defisit sekitar 574 tempat tidur.

Fasilitas kesehatan terkonsentrasi di kawasan Pantura, sementara 63% wilayah lain, terutama pedesaan dan bagian Selatan tidak terlayani dengan baik. Ketimpangan distribusi ini bukan sekedar masalah teknis Kesehatan, melainkan masalah keadaan fiskal. Masyarakat miskin di wilayah Selatan harus membayar pajak geografis berupa biaya transportasi yang mahal, yang pada akhirnya meniadakan manfaat dari subsidi layanan kesehatan itu sendiri. Kondisi ini

berkontribusi pada tingginya angka *Death on Arrival* (DOA), yang mencapai 291 kasus pada 2024. Situasi tersebut menegaskan perlunya kebijakan pembangunan rumah sakit yang lebih merata untuk mengurangi disparitas pelayanan kesehatan di Indramayu (Sudarmanta, 2025). Hal ini memperlihatkan bahwa tanpa pemerataan pembangunan rumah sakit, masyarakat di wilayah terpencil akan tetap terperangkap dalam lingkaran buruk antara kesehatan dan ekonomi.

Penelitian oleh (Ismail et al., 2021) menemukan bahwa belanja kesehatan memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena peningkatan anggaran kesehatan mampu memperbaiki akses layanan kesehatan, meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan, serta mendukung peningkatan angka harapan hidup masyarakat. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari (Nursita et al., 2025) dan (Banase & Purwono, 2024) yang juga menyimpulkan bahwa peningkatan alokasi anggaran kesehatan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan status kesehatan dan penurunan angka kematian.

Di sisi lain, penelitian oleh (Aulia et al., 2023), (Hamid et al., 2024) dan (Alberthus et al., 2025) tidak menunjukkan pengaruh signifikan dari belanja kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kondisi tersebut dapat terjadi karena pengelolaan anggaran kesehatan belum optimal, distribusi fasilitas kesehatan belum merata, serta sebagian besar anggaran masih difokuskan pada belanja operasional sehingga dampaknya terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat belum maksimal. Hasil ini menegaskan bahwa hubungan antara belanja kesehatan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat bersifat kontekstual dan dipengaruhi faktor pengelolaan dana dan karakteristik daerah.

Dalam konteks pembangunan sektor publik, belanja modal memiliki peran strategis sebagai elemen pendukung penyediaan sarana fisik dan infrastruktur yang esensial dalam menunjang efektivitas penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengeluaran pada pos ini tidak hanya ditujukan untuk memperoleh aset tetap seperti jalan, jembatan, gedung sekolah, dan

fasilitas kesehatan, tetapi juga berfungsi memperluas kapasitas pelayanan publik yang dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat (Tumbuan et al., 2023).

Tabel 1. 2 Realisasi dan Komposisi Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2020–2024 (Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Total Belanja	Belanja Pegawai	Rasio Belanja Pegawai	Belanja Modal	Rasio Belanja Modal
2020	3.312,20	1.297,60	39,2%	317,73	9,6%
2021	3.257,42	1.367,22	42,0%	306,79	9,4%
2022	3.197,44	1.418,75	44,4%	251,93	7,9%
2023	3.585,05	1.379,80	38,5%	579,95	16,2%
2024	3.736,42	1.416,03	37,9%	510,22	13,7%

Sumber: LRA APBD Kabupaten Indramayu, data diolah peneliti (2025)

Sebagian besar belanja daerah di Indonesia masih terkonsentrasi pada belanja pegawai, sedangkan porsi belanja modal relatif kecil (Saputra & Khoirunurrofik, 2022). Dalam konteks Kabupaten Indramayu, struktur belanja daerah selama periode 2020-2024 menunjukkan bahwa proporsi belanja pegawai berada pada kisaran 37,9% hingga 44,4% dari total belanja daerah. Sementara itu, belanja modal berada pada kisaran 7,9% hingga 16,2%. Data tersebut menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir belanja operasional, khususnya belanja pegawai, memiliki porsi yang relatif besar dan stabil dibandingkan belanja modal yang bersifat produktif dan cenderung fluktuatif. Komposisi ini mencerminkan karakteristik struktur anggaran daerah yang didominasi oleh belanja rutin.

Kondisi tersebut dapat terjadi karena pemerintah daerah memiliki kewajiban rutin yang cukup besar dalam membiayai gaji, tunjangan, dan operasional aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, keterbatasan kapasitas fiskal daerah menyebabkan ruang anggaran untuk belanja yang bersifat produktif, seperti belanja modal, menjadi lebih terbatas. Akibatnya, alokasi anggaran lebih banyak terserap pada belanja operasional dibandingkan pembangunan aset atau infrastruktur publik yang dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan manusia.

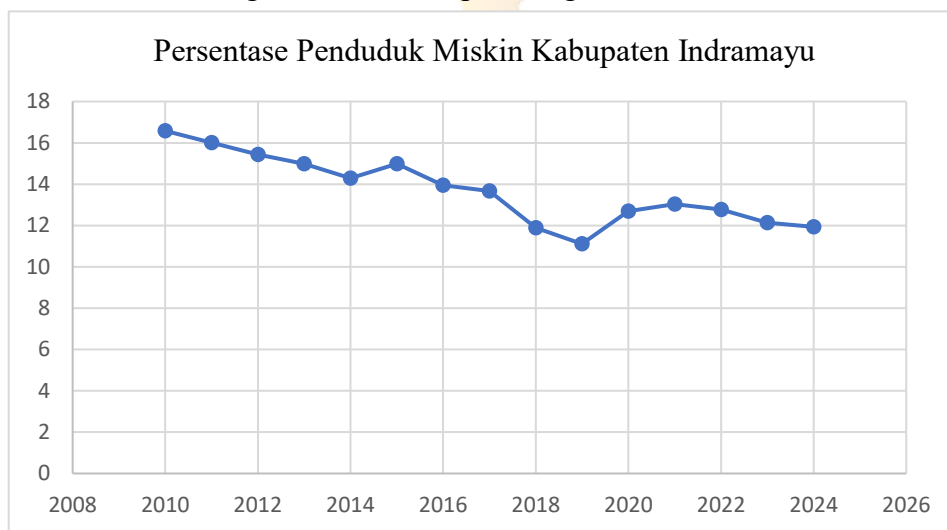
Dalam penelitian (Fauzan, 2025) menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena peningkatan belanja modal mampu memperbaiki infrastruktur publik seperti jalan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan sarana pelayanan masyarakat. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi sehingga berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hasil ini mendukung bahwa peningkatan belanja modal dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan infrastruktur publik yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh (Tumbuan et al., 2023) dan (Banase & Purwono, 2024).

Namun berbeda ditemukan dalam penelitian (Imantria & Kurnia, 2024a), dan (Jesika et al., 2024) yang menyimpulkan bahwa belanja modal memiliki efek negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kondisi tersebut dapat terjadi karena pengalokasian belanja modal belum tepat sasaran, pembangunan infrastruktur belum merata, serta manfaat pembangunan fisik membutuhkan waktu yang relatif panjang untuk dapat dirasakan masyarakat. Selain itu, belanja modal yang lebih banyak difokuskan pada proyek tertentu dan kurang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dapat menyebabkan dampaknya terhadap IPM menjadi tidak optimal.

Berdasarkan pembahasan penelitian tersebut, dampak negatif belanja modal dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, antara lain keterbatasan ruang fiskal yang menyebabkan alokasi belanja modal, serta alokasi anggaran belanja modal yang tidak terintegrasi dengan fungsi pendidikan dan kesehatan (Kakadir et al., 2021). Meskipun penelitian tersebut dilakukan pada konteks dan wilayah yang berbeda, temuan ini memberikan gambaran bahwa efektivitas belanja modal sangat bergantung pada efisiensi, efektivitas, dan ketepatan prioritas dalam pengelolaannya.

Namun demikian, efektivitas belanja daerah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi masyarakat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Indramayu masih relatif tinggi dibandingkan daerah lain di Jawa Barat. Pada tahun 2024 persentase penduduk miskin di Indramayu tercatat

sebesar 11,93%, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat yang sebesar 7,46% (BPS Kabupaten Indramayu, 2024). Bahkan Kabupaten Indramayu secara konsisten termasuk dalam Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Barat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat Indramayu masih menghadapi tantangan serius dan memerlukan kebijakan fiskal daerah yang lebih efektif dalam pengalokasian belanja untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas pembangunan manusia.



Gambar 1. 2. Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Indramayu Tahun 2015-2024

Sumber : [Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu](#), data diolah peneliti (2025)

Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bukan indikator langsung untuk mengukur kemiskinan, namun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sering kali menjadi tanda perbaikan dalam berbagai aspek yang berpotensi menurunkan angka kemiskinan. Perbaikan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang lebih baik turut mendukung upaya pengentasan kemiskinan dalam jangka panjang. Dalam konteks tertentu, hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan kemiskinan menjadi lebih nyata, terutama ketika ditinjau dalam rentang waktu yang cukup panjang dan melalui analisis sosial dan ekonomi yang komprehensif (Alfira Balqis et al., 2024). Oleh karena itu, kondisi kemiskinan yang masih relatif tinggi di Kabupaten indramayu diduga dapat mempengaruhi hubungan antara belanja daerah dan peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia).

Berdasarkan uraian tersebut, Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disuatu daerah tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya alokasi belanja daerah, tetapi juga oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat. Meskipun pemerintah daerah telah mengalokasikan belanja pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan dan belanja modal, efektivitas belanja tersebut dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia belum tentu berjalan dengan optimal, terutama pada daerah dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Selain itu, hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh belanja daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih menunjukkan temuan yang tidak konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan dan belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan tingkat kemiskinan sebagai variabel moderasi Kabupaten Indramayu.

B. Identifikasi Masalah

Dilihat dari latar belakang yang dipaparkan diatas, maka identifikasi masalah dalam riset sebagai berikut :

1. Di Jawa Barat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Indramayu berada di bawah rata-rata provinsi dan termasuk dalam kabupaten dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan manusia di tingkat daerah
2. Dalam lima tahun terakhir Indramayu konsisten masuk dalam Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Barat. Hal ini mengindikasikan rendahnya kualitas kesejahteraan masyarakat dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar
3. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingginya kemiskinan menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kontribusi ekonomi daerah terhadap pangan nasional dengan tingkat kesejahteraan penduduknya
4. Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Indramayu menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, namun capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas

pembangunan manusia melalui pengelolaan belanja publik, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan belanja modal, belum sepenuhnya optimal

5. Ketidakmerataan distribusi fasilitas pelayanan dasar, alokasi belanja fungsi kesehatan belum sepenuhnya mampu mengatsi disparitas fasilitas antarwilayah, yang terbukti dari tingginya angka *Death on Arrival* (DOA) di wilayah terpencil.
6. Penelitian terdahulu umumnya menggunakan data panel lintas kabupaten/provinsi. Sedikit yang mengkaji secara mendalam kabupaten agraris seperti Indramayu yang memiliki karakteristik unik yaitu kemiskinan tinggi, yang dapat memoderasi pengaruh belanja daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan mendalam, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Ruang lingkup objek penelitian ini difokuskan pada Realisasi Belanja Fungsi Pendidikan dan Realisasi Belanja Fungsi Kesehatan yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Indramayu
2. Indikator kinerja atau (*Outcome*) capaian Pembangunan manusia (IPM), dengan menempatkan Tingkat Kemiskinan sebagai faktor konteks yang mempengaruhi efektifitas belanja publik tersebut.
3. Data yang digunakan adalah data sekunder (LRA dan BPS) dalam kurun waktu 15 tahun terakhir (2010-2024) untuk melihat tren hubungan antarvariabel secara konsisten.
4. Lokus penelitian dibatasi pada wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Indramayu, dengan mempertimbangkan karakteristiknya sebagai daerah agraris yang memiliki tingkat kemiskinan persisten di Jawa Barat.
5. Fokus analisis, ditekankan pada aspek efektivitas belanja publik dalam mengatasi hambatan akses layanan dasar yang sera kolektif berdampak pada capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

D. Rumusan Masalah

Dilihat dari pemaparan latar belakang tersebut di atas, adapun permasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini:

- A. Apakah belanja pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Indramayu?
- B. Apakah belanja kesehatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Indramayu?
- C. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Indramayu?
- D. Apakah tingkat kemiskinan memoderasi pengaruh belanja pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Indramayu?
- E. Apakah tingkat kemiskinan memoderasi pengaruh belanja kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Indramayu?
- F. Apakah tingkat kemiskinan memoderasi pengaruh belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Indramayu?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh belanja pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Indramayu selama periode 2010–2024.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh belanja kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Indramayu selama periode 2010–2024.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Indramayu selama periode 2010–2024.
4. Menguji dan menganalisis apakah tingkat kemiskinan memoderasi pengaruh belanja Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Indramayu

5. Menguji dan menganalisis apakah tingkat kemiskinan memoderasi pengaruh belanja Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Indramayu
6. Menguji dan menganalisis apakah tingkat kemiskinan memoderasi pengaruh belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Indramayu

2. Kegunaan Penelitian

1) Kontribusi Teoretis

- a. Memberikan tambahan bukti empiris tentang hubungan antara belanja daerah (pendidikan, kesehatan, dan belanja modal) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tingkat kabupaten.
- b. Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran tingkat kemiskinan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara belanja daerah dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- c. Memperkaya literatur akuntansi sektor publik, akuntansi keuangan daerah, dan ekonomi pembangunan yang selama ini lebih banyak dilakukan pada level provinsi atau nasional, dengan studi kasus spesifik pada daerah agraris dengan kemiskinan relatif tinggi.

2) Kontribusi Praktik

- a. Menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Indramayu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Bappeda, dan Dinas Keuangan Daerah dalam mengevaluasi efektivitas pengalokasian anggaran pendidikan, kesehatan, dan belanja modal terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia.
- b. Memberikan informasi mengenai bagaimana tingkat kemiskinan dapat mempengaruhi efektivitas belanja daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran.
- c. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi para akademisi, mahasiswa, dan peneliti selanjutnya yang berminat meneliti hubungan

antara keuangan daerah, kemiskinan dan pembangunan manusia pada tingkat kabupaten/kota.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun ke dalam lima bab utama yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan pembahasan, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, serta rumusan masalah penelitian. Selain itu dijelaskan pula tujuan dan manfaat penelitian dari segi teoritis, praktis, maupun kebijakan, serta gambaran umum sistematika penulisan karya ilmiah ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan teori-teori yang mendasari penelitian, hasil kajian pustaka, dan penelitian terdahulu yang relevan. Di dalamnya juga disusun kerangka konseptual serta hipotesis yang menjadi dasar analisis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, mulai dari jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, hingga metode analisis yang meliputi pengujian model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model).

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil olah data, interpretasi, dan pembahasan temuan penelitian yang dikaitkan dengan teori serta hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian, implikasi dari temuan yang diperoleh, serta saran yang dapat menjadi masukan bagi penelitian atau kebijakan selanjutnya.